

ANALISIS PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN LUAR NEGERI



Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab:

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA.

Penulis:

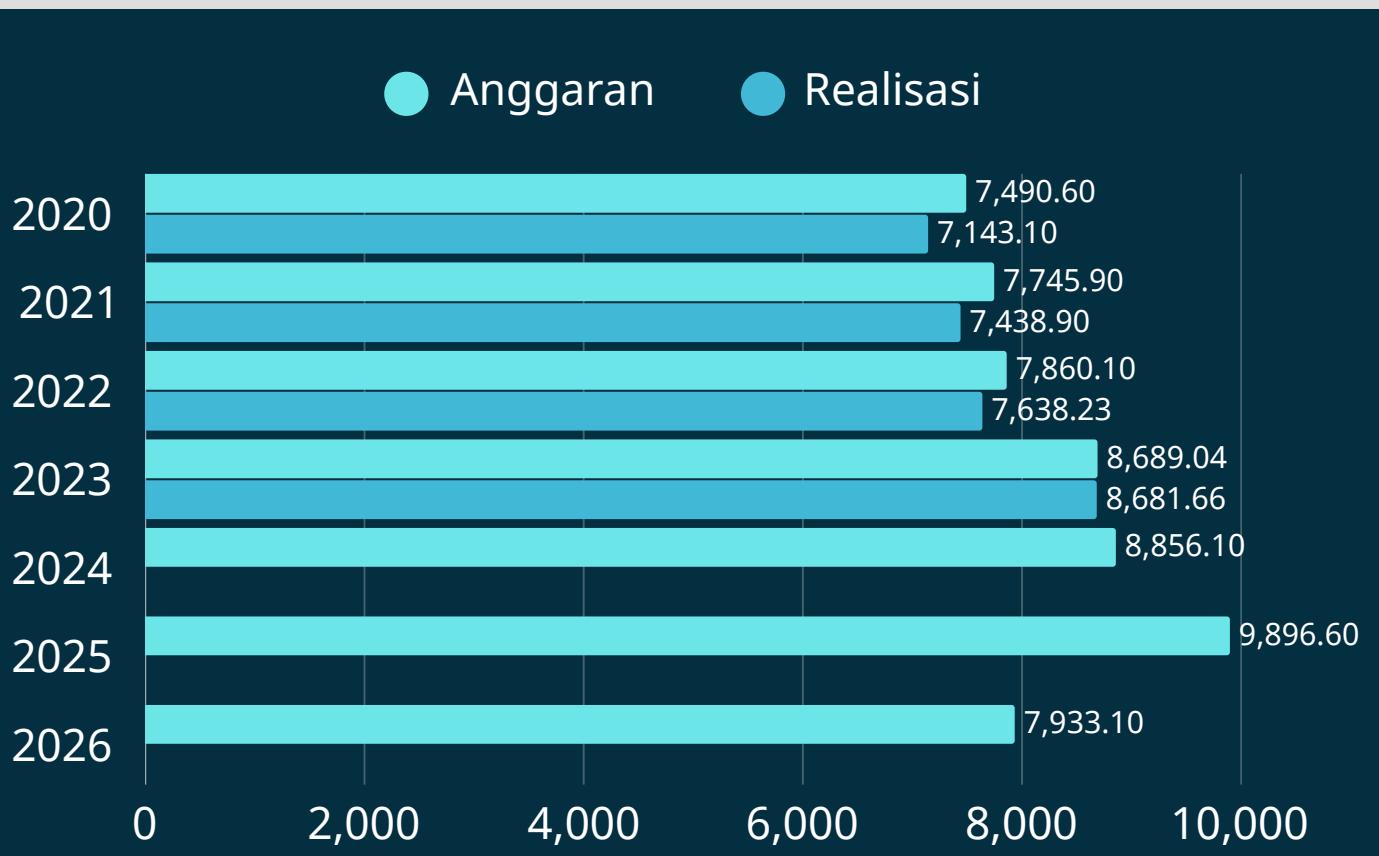
Robby A. Sirait, M.E., Ade Nurul Aida, M.E., Leo Iskandar, S.E.

JUNI 2025

Daftar Isi

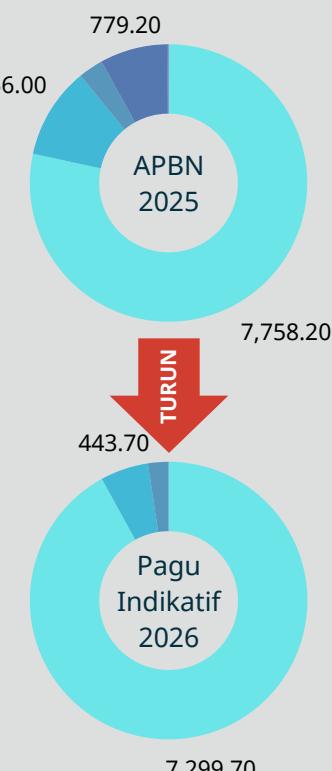
Pagu Indikatif 2026	02
Overview Anggaran 2020-2026	03
Output & Outcome Anggaran 2025	04
Kemenlu dalam PN 02 RPJMN 2025-2029	06
Kemenlu dalam PN 07 RPJMN 2025-2029	10
Asia Power Index-Diplomatic Influence	12





Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2024-2025, KEM PPKF 2026

*Dalam miliar rupiah



Pagu Indikatif 2026

Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2026 sebesar Rp7.933,1 miliar; dengan rincian Program Dukungan Manajemen Rp7.299,7 miliar; Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral Rp443,7 miliar; dan Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik Rp189,7 miliar.

Nilai Pagu Indikatif 2026 tersebut menurun sebesar 19,84 persen dibanding Alokasi Anggaran dalam APBN 2025 yang sebesar Rp9.896,6 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Overview Anggaran 2020-2026

HALAMAN 3



Realisasi Anggaran 2020-2023

Sepanjang tahun 2020-2023, realisasi anggaran Kemenlu selalu di atas 95 persen, dengan realisasi tertinggi sebesar 99,92 persen di tahun 2023. Pada tahun yang sama, Indonesia menggelar perhelatan internasional dengan menjadi tuan rumah sekaligus memegang keketuaan ASEAN tahun 2023.



Proporsi Terbesar Anggaran Kemenlu Dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen

Sepanjang tahun 2021-2025, proporsi terbesar anggaran Kemenlu dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dengan rata-rata per tahun sebesar 79,27 persen. Proporsi tersebut semakin meningkat menjadi sebesar 92,02 persen dari Pagu Indikatif Kemenlu Tahun 2026.

Program Dukungan Manajemen Kemenlu Tahun Anggaran 2025 utamanya ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana, pengelolaan SDM, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM).



Porsi Belanja Pegawai Merupakan Jenis Belanja Terbesar

Sepanjang tahun 2020-2023, proporsi terbesar anggaran Kemenlu berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan rata-rata per tahun sebesar 45,8 persen. Kemudian diikuti belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 42,8 persen dan 11,4 persen.



Target Keluaran/Output 2025

- Kebijakan Bidang Politik: 98 Rekomendasi Kebijakan, Kajian (83 untuk Program 2)
- Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan: 101 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
- Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan: 33 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
- Kebijakan Bidang Sosial: 30 Rekomendasi Kebijakan, Kajian
- Koordinasi: 16 kegiatan
- Forum: 49 forum (152 untuk Program 2)
- Kerja Sama: 889 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan (66 untuk Program 4)
- Sosialisasi dan Diseminasi: 5.510.992 orang
- Promosi: 1.387 Promosi, Kegiatan
- Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: 979 Kelompok Masyarakat
- Pelayanan Publik kepada Masyarakat: 572.691 orang
- Pelayanan Publik kepada Lembaga: 410 lembaga
- Pelayanan Publik Lainnya: 204.579 layanan

→ **Target Outcome 2025**

- Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan
- Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan
- Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum kerja sama multilateral dan ASEAN
- Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional
- Kebijakan luar negeri yang berkualitas
- Pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima
- Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional

Kemenlu dalam PN O2 RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	Asta Cita 2 (PN 02) Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
PROGRAM PRIORITAS (PP)	02.09. Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi			
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terpeliharanya hubungan internasional yang kondusif dengan terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi			
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara 02. Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional 03. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional 04. Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi			
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	02.09.01. Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap Mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema Good Neighbour Policy	02.09.02. Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia	02.09.03. Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	02.09.04. Penguatan Diplomasi Ekonomi
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terlaksananya percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy	01. Meningkatnya peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, terbangunnya postur diplomasi, serta meningkatnya pelibatan diaspora Indonesia	01. Menguatnya kerja sama pembangunan internasional	01. Terwujudnya penguatan diplomasi ekonomi

INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	01. Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	01. Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral 02. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral 03. Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia / wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional 04. Angka pembangunan postur diplomasi 05. Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	01. Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	01. Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri 02. Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas
-------------------------------------	--	--	---	--

Kemenlu berkewajiban menjalankan PP 02.19 "Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi" guna menopang pencapaian salah satu target indikator PN 02, yakni Asia Power Index (Diplomatic Influence) sebesar 66,1 pada 2029 dengan baseline 2024 sebesar 65,6.

TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS (PP 02.19)

- Nilai Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara di 2029 ditargetkan sebesar 0,580 tanpa baseline 2024 (indikator baru).
- Nilai Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional di 2029 ditargetkan sebesar 4,50 dengan baseline 2024 (2023) sebesar 4,97.
- Nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional di 2029 ditargetkan sebesar 4,18 dengan baseline 2024 sebesar 4,07.
- Nilai Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi di 2029 ditargetkan sebesar 80 dengan baseline 2024 sebesar 75.

Dalam rangka mencapai 4 target indikator PP 02.19 "Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi" tersebut, Kemenlu berkewajiban menjalankan 4 Kegiatan Prioritas, yakni KP 02.09.01, KP 02.09.02, KP 02.09.03 dan KP 02.09.04

<p>TARGET INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS</p>	<p>Target KP 02.09.01:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga di 2029 ditargetkan sebesar 76,21 dengan baseline 2024 sebesar 52,43. 	<p>Target KP 02.09.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral di 2029 ditargetkan sebesar 79% dengan baseline 2024 sebesar 75 %. Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral di 2029 ditargetkan sebesar 79% dengan baseline 2024 sebesar 75%. Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia / wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional di 2029 ditargetkan sebesar 79% dengan baseline 2024 sebesar 75%. Angka pembangunan postur diplomasi di 2029 ditargetkan sebesar 25 tanpa baseline 2024 (indikator baru). Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia di 2029 ditargetkan sebesar 40% dengan baseline 2024 sebesar 15%. 	<p>Target KP 02.09.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional di 2029 ditargetkan sebesar 100 persen tanpa baseline 2024 (indikator baru). 	<p>Target KP 02.09.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri di 2029 ditargetkan sebesar 84 persen dengan baseline 2024 sebesar 75 persen. Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas di 2029 ditargetkan sebesar 82 persen dengan baseline 2024 sebesar 75 persen.
---	--	--	--	--

Dalam rangka mencapai berbagai target indikator KP tersebut, Kemenlu akan menjalankan beberapa proyek prioritas.

PROYEK PRIORITAS

KP 02.09.01: <ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara.	KP 02.09.02: <ul style="list-style-type: none">• Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia• Strategi Pembangunan Postur Diplomasi• Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif	KP 02.09.03: <ul style="list-style-type: none">• Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional• Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional	KP 02.09.04: <ul style="list-style-type: none">• Diplomasi Ekonomi yang Adaptif• Diplomasi Ekonomi yang Strategis dengan Mitra Utama• Diplomasi Ekonomi dengan Negara Tetangga, Perbatasan, Regional, dan Sub Regional
---	--	---	---

Kemenlu Dalam PN 07 RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL (PN)	<p>Asta Cita 7 (PN 07)</p> <p>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan</p>
PROGRAM PRIORITAS (PP)	07.16. Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia
SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Terwujudnya pelindungan WNI, termasuk pekerja migran Indonesia
INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS	01. Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri
KEGIATAN PRIORITAS (KP)	07.16.02. Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS	01. Terintegrasinya dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI, termasuk PMI di luar negeri
INDIKATOR KEGIATAN PRIORITAS	<p>01. Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri</p> <p>02. Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri</p> <p>03. Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri</p>

Kemenlu berkewajiban menjalankan 07.16 "Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia" guna menopang pencapaian salah satu target indikator PN 07, yakni Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri sebesar 95,5 pada 2029 dengan baseline 2024 sebesar 93.

TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM PRIORITAS

- Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri di 2029 ditargetkan sebesar 89 persen dengan baseline 2024 sebesar 85 persen.

Guna mencapai target indikator program prioritas tersebut, Kemenlu akan menjalankan 07.16.02. Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif, dengan 2 proyek prioritas.

**TARGET INDIKATOR
KEGIATAN
PRIORITAS**

- Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri di 2029 ditargetkan sebesar 96,4 dengan baseline 2024 sebesar 96.
- Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri di 2029 ditargetkan sebesar 96,4 dengan baseline 2024 sebesar 96.
- Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri di 2029 ditargetkan sebesar 99,1 dengan baseline 2024 sebesar 98,5.

PROYEK PRIORITAS

- Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan
- Penanganan Kasus WNI di Luar Negeri

Asia Power Index

Diplomatic Influence



Asia Power Index tahun 2024, pada ukuran Diplomatic Influence menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan nilai dan peringkat dari tahun sebelumnya yang didorong oleh kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN tahun 2023. Namun demikian, terdapat hal yang perlu diantisipasi di masa depan, khususnya sehubungan dengan penurunan anggaran dalam program-program yang dijalankan Kemenlu di tahun 2026.

→ Pengosongan Anggaran Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional

Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional Kementerian Luar Negeri ditujukan antara lain untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata; meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional; serta mewujudkan hubungan bilateral yang kuat antara lain di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta bidang politik, keamanan dan maritim. Kosongnya anggaran untuk program tersebut dapat berdampak kepada tidak tercapainya penguatan diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional yang merupakan intrenensi kebijakan dalam mewujudkan sasaran prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

→ Penurunan Anggaran Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral

Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri ditujukan antara lain untuk meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia di dunia internasional serta mewujudkan hubungan multilateral yang kuat, antara lain pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta bidang politik, keamanan dan maritim. Pemangkasan anggaran pada program tersebut sebesar Rp612 miliar atau 57,98 persen dari pagu anggaran program yang sama dalam APBN 2025 perlu diantisipasi karena dapat melemahkan serangkaian intrenensi kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan sasaran prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029, antara lain penguatan kepemimpinan Indonesia di tingkat global dan kerja sama internasional.



Follow Kami



www.bkd.dpr.go.id



[pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)